# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

# 2.1 Literatur Riview

Penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Peran *United Nations Development Programme* yang ditulis oleh Oki Astriani merupakan gagasan menulis penelitian penulis karena penelitian ini menginspirasi penulis.

Penelitian ini menjelaskan bahwa ada *country programme* dari UNDP untuk negara-negara tujuan dan salah satu negara tujuan tersebut adalah Indonesia dan disetujui menjadi *Country Programme Action Plan* (CPAP) periode 2006-2010, program tersebut berfokus pada tiga perbaikan yaitu kepemerintahan lokal, pendalaman demokrasi, serta hak hukum dan keadilan. Program kepemerintahan demokratis dari UNDP di tahun 2006-2010 bertujuan untuk menunjukkan isu-isu demokrasi dan kepemerintahan, gender, dan wilayah, terutama pada komunitas-komunitas termarjinal dan terkena dampak konflik. Programnnya yaitu *Program Parliamentary Support, Peace Through Development Programme,* dan *Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh*.[[1]](#footnote-2)

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan ialah Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif yang tulis oleh Zaenal Mukarom.

Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa budaya partiarki masih sangat kenal di Indonesia dan strategi komunikasi bisa menjadi salah satu cara untuk perempuan berpartisipasi dalam dunia politik. Cara tersebut ialah dengan adanya pengarusutamaan gender *(gender mainstream)* dengan adanya pendidikan politik bagi perempuan dan partai politik adalah salah satu jalan partisipasi politik bagi perempuan karena partai politik sebagaimana pandangan Miriam Budiardjo menyelenggarakan 4 fungsi yaitu: komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik, dan pengatur konflik.[[2]](#footnote-3)

Penelitian selanjutnya adalah Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia ditulis oleh M. Rahmatunnisa.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa partisipasi politik kaum perempuan terkait dengan kebijakan *affirmative action* terfokus pada bentuk dalam keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan secara forrmal dalam institusi politik seperti parlemen, birokrasi atau partai politik. Dasar dari pemikiran kebijakan *affirmative action* ini adalah agar kaum perempuan dapat memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi *(influential voice)* berbagai institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki. Adapun metode *affirmative action* untuk menjamin keterwakilan politik perempuan dapat dilakukan beragam. Dua diantaranya yang paling utama adalah kuota yang ditetapkan melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan dan kuota melalui partai politik. Dalam CEDAW juga diatur bahwa *affirmative action* merupakan strategi khusus yang temporer yang diadopsi untuk mengakselerasi *de facti quality* antara perempuan dan laki-laki. Tren penerapan *affirmative action* dalam bentuk kuota gender mengindikasikan pentingnya kebijakan tersebut. Para ahli juga mengkonfirmasi bahwa sistem quota gender dipandang sebagai cara yang paling efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, khususnya di lembaga legislatif.[[3]](#footnote-4)

Persamaan yang terlihat dari ketiga penelitian tersebut adalah kurangnya partisipasi politik perempuan dan menjelaskan bagaimana untuk bisa meningkatkannya melalui peraturan, program, dan institusi yang ada.

Perbedaanya penelitian yang ditulis oleh Zaenal Mukarom dan M. Rahmatunnisa yaitu berada pada cara meningkatkan partisipasi politik perempuan tersebut. Dalam kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa strategi komunikasi politik dan kebijakan *affirmative action* bisa meningkatkan partisipasi politik perempuan, tetapi penelitian penulis tidak banyak membahas strategi komunikasi politik dan kebijakan *affirmative action* yang diusung oleh kedua penelitian tersebut karena penulis berfokus pada program yang diberikan UNDP untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Sedangkan penelitian Oki Astriani dan penelitian penulis itu hampir sama, yang membedakannya terletak pada program dan hasil, dalam penelitian tersebut hanya berlangsung pada periode 2006 sampai 2010. Sedangkan dalam penelitian penulis menambahkan hasil peningkatan pada partisipasi politik perempuan di parlemen pada tahun 2013 dan 2016, setelah program yang dijalankan UNDP telah selesai pada tahun 2010. Kemudian, penulis menambahkan data terbaru dengan program berkelanjutan dari UNDP 2017-2020. Oleh karena itu, penulis merencanakan penelitian skripsi tersebut dengan judul: **“Peran *United Nations Development Prograamme (UNDP)* untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia”**

# 2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam penyusunan penelitian ini akan digunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh teori-teori dari para pakar dan para ahli Hubungan Internasional yang berkompeten dalam penelitian ini.

Kerangka Pemikiran mengemukakan dasar pemikiran serta dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari teori-teori dan asumsi para pakar. Fungsi dari kerangka pemikiran adalah untuk menentukan variabel-variabel mana saja yang terlibat dalam penelitian ini, serta dimana masing-masing variabel dalam kerangka tersebut. Dalam bentuk kerangka akan terlihat jelas variabel bebas maupun terikat, agar lebih mudah menentukan suatu variabel terikat maupun bebas, maka digunakan teori-teori yang sudah ada.

Untuk dapat memahami hal tersebut, peneliti menuangkan dengan menyertakan beberapa gambaran mengenai peran itu sendiri. Soedjono Soekanto menyatakan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Masih menurut Soedjono Soekanto:

**“Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang biasa dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur social masyarakat.”[[4]](#footnote-5)**

Menurut Jack C. Plano, yang dimaksud dengan peran dalam Kamus Analisa Politik diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah sebagai akibat darituntutan atau harapan terhadap peran yang dipegang oleh seorang aktor politik.[[5]](#footnote-6)

Berbagai ragam definisi, maksud dan peran Organisasi Internasional namun secara umum bisa disimpulkan, bahwa Organisasi Internasional adalah Organisasi yang terdapat didalam masyarakat Internasional. Organisasi Internasional tersebut terbentuk karena adanya suatu kepentingan yang sama dari berbagai bangsa-bangsa atau Negara, dimana Organisasi Internasional merupakan salah satu wujud dari kerjasama Internasional, dimana hal ini didahului oleh adanya kepentingan-kepentingan yang sama, yang dilahirkan oleh adanya hubungan yang menjadi pokok dari terbentuknya Organisasi Internasional.

Dalam melakukan interaksi antar negara-negara didunia, diperlukan suatu wadah yang secara mendasar memiliki fungsi sebagai fasilitator untuk terciptanya hubungan antar Negara, guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Hubungan suatu Negara dalam kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua Negara tidak akan terlepas dari peran aktif yang dilakukan oleh berbagai komponen untuk mendukung semua itu, serta implementasi yang dilakukan untuk adanya jaminan dari situasi yang diharapkan, serta tidak terlepas dari aturan dan pola yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Salah satu komponen yang melakukan interaksi Internasional adalah Organisasi Internasional. Maka dengan demikian menurut Jack L. Plano dan Roy Olton, Organisasi Internasional adalah:

**“Suatu ikatan formal melampaui suatu batas nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, politik serta bidang lainnya.”[[6]](#footnote-7)**

Organisasi Internasional didirikan atau dibentuk dengan suatu tujuan dengan maksud untuk saling membantu dalam memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi oleh Negara-negara anggota maupun Negara non anggota. Organisasi Internasional ditinjau dari kegiatan administrasinya dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu, organisasi antar Pemerintah (IGO) dan organisasi non Pemerintah (NGO), menurut William D. Coplin, maka dengan demikian menurutnya organisasi Internasional adalah:

**“Suatu organisasi yang dibentuk antar individu-individu atau organisasi atau organisasi swasta diberbagai Negara. Organisasi ini berbeda dari organisasi antar Pemerintah, karena anggotanya bukan Negara, melainkan warga Negara dan organisasi-organisasi swasta**.”[[7]](#footnote-8)

Organisasi-organisasi Internasional Pemerintah dapat memainkan peranan yang cukup penting antara lain dalam mencari upaya kearah kerjasama antara berbagai Negara disuatu bidang, dimana organiasi-organisasi itu dapat memberikan keuntungan bagi semua negara. Selain itu organisasi non-Pemerintah bisa merupakan saluran untuk mengadakan komunikasi antar Pemerintah, dengan demikian apa yang dapat disepakati bersama dapat di implementasikan, dan bilamana masalah akan timbul maka dapat diatasi secara bersama.

Dalam penelitian ini pun mengacu kepada kesetaraan gender, istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Pembedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Kata “gender‟ dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.[[8]](#footnote-9)

Menurut West & Zimmerman 1987, gender adalah:

***“Gender is not a noun- a “being‟–but a “doing‟. Gender is created and reinforced discursively, through talk and behavior, where individuals claim a gender identity and reveal it to others”[[9]](#footnote-10)***

Berpatisipasi dan menjadi bagian dalam dunia politik pun pada saat ini sudah tidak dibatasi lagi antara perempuan dan laki-laki, karena politik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari periaku politik warga Negara. Huntington dan Nelson, memberikan definisi bahwa:

**“partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.”[[10]](#footnote-11)**

Defenisi tersebut menjelaskan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah partisipasi politik bukan semata sikap-sikap, namun merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat empiris, merupakan kegiatan warga negara asli, bukan individu-individu yang bermain di wilayah pemerintahan; pokok perhatiannya adalah kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan kegiatan tersebut tidak memperdulikan berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai, yaitu mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah.

Secara lebih spesifik, budiarjo mendefinisikan:

**“partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy).* Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan *(contacting)* dengan pejabat pemerintah atau parlemen dan sebagainya.”[[11]](#footnote-12)**

Oleh karena itu dari penjelasan diatas, perempuan pun bisa berpatisipasi dengan bebas karena partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang ingin menciptakan perubahan dan kemujan untuk negaranya dalam berpolitik, baik mempengaruhi kebijakan, turut aktif langsung dalam kehidupan politik ataupun menjadi pemimpin negara.

Dalam konteks partisipasi politik perempuan, Almond dan Verba mengemukakan bahwa:

**“Prosentase kaum perempuan dalam partisipasi lebih rendah daripada kaum pria, misalnya perempuan lebih sedikit membicarakan politik daripada kaum pria, kecenderungan kaum perempuan lebih rendah daripada pria menjadi anggota organisasi sukarela, perempuan lebih sedikit partisipasinya dalam sebuah demonstrasi daripada pria, dan sebagainya”[[12]](#footnote-13)**

Hambatan selalu untuk perempuan berpartisipasi dalam dunia politik, begitu pula partisipasi politik perempuan di Indonesia. Menurut Poerwandari mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia adalah:

**“Partisipasi politik perempuan Indonesia adalah cerita yang pluralistik yang tergantung kepada kultur lokal yang berkembang yakni bilateral, matrilineal, maupun patrilineal yang kesemunya memiliki corak pandang khas terhadap perempuan Indonesia.”[[13]](#footnote-14)**

# 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas, maka penulis mempunyai jawaban sementara bagi penelitian ini, yaitu: **“Dengan adanya peran UNDP dengan program *Parliamentary Support, Gender Equity and Women’s Rights, Peace Through Development,* dan *Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh*, maka partisipasi politik perempuan di Indonesia akan meningkat ditandai dengan banyaknya perempuan yang ikut aktif dalam kegiatan politik”**

# 2.4 Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik dan Analisis)

Untuk membantu dan menganalisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi oprasional variabel dan indikator konsep hipotesis di atas yaitu:

**Tabel 2.1** Operasional Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas: Dengan adanya peran UNDP dengan program *Parliamentary Support, Gender Equity and Women’s Rights, Peace Through Development,* dan *Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh*. | 1. Adanya konsep MDGs yang diusung PBB dan diterapkan dalam UNDP terkait dengan kesetaraan gender.  2. Adanya program yang diberikan UNDP untuk meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan. | 1.*Millenium Development Goals.*  <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html>  2.*UNDP Country Programme for Indonesia* (2006-2010).  <http://www.undp.org/content/dam/indonesia/docs/CPD%202006-2010.pdf> |
| Variabel Terikat: Maka partisipasi politik perempuan di Indonesia akan meningkat ditandai dengan banyaknya perempuan yang ikut aktif dalam kegiatan politik. | 3. Munculnya isu-isu, tantangan, peluang dan ancaman untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia.  4. Adanya peran UNDP untuk meningkatan partisipasi politik perempun di Indonesia. | 3. Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah.  <http://www.batukarinfo.com/system/files/Partisipasi%20Perempuan%20dalam%20Politik%20dan%20Pemerintah.pdf>  4. Oki Astriani, Pengaruh Peran *United Nations Development Programme* dalam Peningkatan Partisipasi Politik Wanita di Indonesia. Jurnal Skripsi. <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwil0rSQqZDVAhXGjLwKHRsHDYkQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.unair.ac.id%2Fdownload-fullpapers-Jurnal%2520Skripsi%2520-%2520Oki%2520Astriani%2520(070810511).docx&usg=AFQjCNELOvBiTOzOh1n18EBDBQhwD7K1OA> |

# 2.5 Skema Kerangka Teoritis/Konseptual

**Skema Peran UNDP untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia**

Pemerintah Indonesia

peran

UNDP

UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan

Goals nomor 3 MDGs

UNDP mengeluarkan *country programme* untuk Pemerintah Indonesia

UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum

*Parliamentary Support, Gender Equity and Women’s Rights, Peace Through Development,* dan*Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh*.

Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

1. Oki Astriani, *“Pengaruh Peran United Development Programme dalam Peningkatan Partisipasi Politik Wanita di Indonesia”.* Jurnal Skripsi. Hal 2-17. [↑](#footnote-ref-2)
2. Zaenal Mukarom, “*Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif”.* Vol 9, No 2. Hal 263-267. [↑](#footnote-ref-3)
3. Mudiyati Rahmatunnisa, “*Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia”.* Vol 1, No. 2. Hal 91-93. [↑](#footnote-ref-4)
4. Soedjono Soekanto, ”*Sosialogi Suatu Pengantar*”, Jakarta (Erlangga, 1998), hal 220. [↑](#footnote-ref-5)
5. Jack C. Plano, Robert E. Ringgs dan Helena S. Robin, 1996, “*Kamus Analisa Politik”,* Jakarta: Rajawali, hal 226. [↑](#footnote-ref-6)
6. Jack L. Plano dan Roy Olton, ”*Kamus Hubungan Internasiona*l”, (terjemahan Wawan Djuanda) (Jakarta: Putra A. Bardin, 1999, hlm. 271) [↑](#footnote-ref-7)
7. William D. Coplin, ”*Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*”. (Bandung Sinar baru, 1992), hal. 194 [↑](#footnote-ref-8)
8. Herien Puspitawati, “*Konsep, Teori, dan Analisis Gender”,* 2013. Hal 1. Diakses di <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>, pada 16 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-9)
9. Herien Puspitawati, “*Konsep, Teori, dan Analisis Gender”,* 2013. Hal 2. Diakses di <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>, pada 16 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-10)
10. Kamaluddin, Skripsi *“Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”*, hal 28. Diakses di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1165/1/PDF%20SKRIPSI%20KAMAL.PDF>, pada 18 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-11)
11. Kamaluddin, Skripsi *“Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”*, hal 28-29. Diakses di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1165/1/PDF%20SKRIPSI%20KAMAL.PDF>, pada 18 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-12)
12. Budi Mulyawan dan Dewi Silfiani, “*Partisipasi Politik Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum Periode Tahun 2014-2019 di Kabupaten Indramayu”.* Jurnal Aspirasi. Vol 5 No. 1, Hal 29. [↑](#footnote-ref-13)
13. Wasisto Raharjo Jati, “*Historisitas Politik Perempuan Indonesia”.* Vol 24, No 2.Hal 204. [↑](#footnote-ref-14)